

JURNAL DEWAN PERS EDISI 19

Pengarah

Yosep Adi Prasetyo
Ahmad Djauhar

Penanggung Jawab / Pemimpin Redaksi

Ratna Komala

Wakil Pemimpin Redaksi

Hendry Ch. Bangun

Penyunting

Winarto
Artini

Sekretariat

Syaefudin
Deritawati Sitorus
Sri Lestari
Watini

Desain & Tata Letak

Rachman Nurwanto

© 2017 DEWAN PERS
ISSN 2085-6199

Sekretariat Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504874-75, 77
Faks. (021) 3452030

Website

www.dewanpers.or.id
www.presscouncil.or.id

E-Mail

sekretariat@dewanpers.or.id

Twitter

@dewanpers

DAFTAR ISI | JURNAL DEWAN PERS | MEI EDISI 19 | 2019

Kata Pengantar: Ketua Dewan Pers	4
Editorial: Ratna Komala	6

UTAMA:

Kolaborasi untuk Merebut Ruang Penulis: Maria Hartiningsih	10
Jurnalisme Perempuan Dalam Organisasi Redaksi dan Jurnalisme Penulis: Sunarto	17
Framing Liputan Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Jimmy Silalahi	26
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Peran Media Penulis: Yohana Susana Yembise	32
Masalah Penyebutan Identitas Dalam Pemberitaan Tentang Anak Oleh Retno (KPAI)	37
Pemberitaan Pers Ramah Anak Penulis: Yosep Adi Prasetyo	42
Media, Jurnalisme, dan Perempuan Penulis: Yosep Adi Prasetyo	50

PROFIL:

Immas Sunarya Wartawati Santun dan Penuh Tanggung Jawab Penulis: Artini	57
--	----

RESENSI:

Perempuan dan Terorisme: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme Penulis: Artini	60
--	----

RISET:

Keberanian TKW Penulis: Artini	64
--	----



SUNARTO

Jurnalis Perempuan dalam Organisasi Redaksi dan Jurnalisme

Sampai saat ini keberadaan jurnalis perempuan dalam struktur organisasi media massa masih terpinggirkan. Kondisi semacam ini dijumpai tidak hanya pada industri media cetak (koran, majalah), tapi juga pada industri media elektronika (radio, televisi) (Johnson, 1993; Sanders, 1993; Zoonen, 1994; Siregar dan kolega, 1999; Soemandoyo, 1999; Suryandaru, 2002; Chambers dan kolega, 2004). Bukalah sebuah media cetak, entah itu koran atau majalah, entah di level nasional atau lokal. Lihat susunan personalia yang ada. Berapa banyak pekerja perempuan dalam struktur organisasi media tersebut? Seandainya ada, keberadaannya pasti bisa dihitung dengan jari. Jurnalis perempuan masih merupakan kelompok minoritas dalam industri media massa, baik di level lokal, nasional maupun global (Sunarto, 2014; 2016).



Source gambar: <http://yellowcabin.com/cerita-dan-tantangan-jurnalis-perempuan/>

Entah disadari atau tidak, jurnalis perempuan mengalami situasi diskriminatif secara kuantitatif maupun kualitatif (Sunarto, 2014). Secara kuantitatif, keberadaan jurnalis perempuan dalam posisi sebagai pimpinan maupun anggota dalam organisasi redaksi media massa masih sangat terbatas. Di sebuah koran lokal, rapat monitoring dan evaluasi redaksi setiap hari untuk persiapan penerbitan rutin hanya diikuti oleh satu atau dua orang pimpinan desk perempuan. Belasan lainnya pimpinan desk pria.

Secara kualitatif, masih dijumpai perlakuan berbeda terhadap jurnalis perempuan dengan anggapan memberikan perlindungan terhadap keselamatannya. Hal ini dijumpai manakala ada liputan kriminalitas dan sejenisnya akan ditugaskan jurnalis pria dan bukan jurnalis perempuan. Dalihnya, demi menjaga keselamatan jurnalis perempuan! Akibatnya tentu akan menghambat mobilitas vertikal diri jurnalis perempuan ini sendiri.

Dalam kajian kepemimpinan dan feminisme dikenal istilah fenomena atap kaca (*glass ceiling phenomena*). Kaum perempuan seolah-olah bisa mencapai posisi pucuk pimpinan dalam sebuah organisasi tanpa hambatan apapun. Ketika tiba saatnya untuk menapaki posisi tersebut, ia terbentur atap kaca yang tidak kelihatan sehingga akhirnya mentok di level pimpinan menengah saja. Jurnalis perempuan pun mengalami situasi semacam itu. Ia seolah-olah bisa mencapai posisi puncak dalam manajemen keredaksian karena posisi tersebut terbuka untuk semua gender. Akan tetapi ketika ia akan menjangkau posisi tersebut, atap kaca menghentikannya. Di Indonesia, posisi CEO perempuan dalam industri media massa masih sulit ditemui. Kalau toh ada, itu terjadi pada media khusus perempuan!

Perlakuan diskriminatif terhadap jurnalis perempuan dalam industri media massa kita bertentangan dengan nilai-nilai normatif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, khususnya pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Nilai normatif

Ketika tiba saatnya untuk menapaki posisi tersebut, ia terbentur atap kaca yang tidak kelihatan sehingga akhirnya mentok di level pimpinan menengah saja. Di Indonesia, posisi CEO perempuan dalam industri media massa masih sulit ditemui...

semacam ini juga ditegaskan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan Undang-undang Nomor 7 sejak 24 Juli 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).

Meskipun kita telah cukup lama meratifikasi ketentuan global semacam itu dan mempunyai aturan nasional yang konsonan dengan ketentuan global tersebut, realita yang ada masih belum sepenuhnya berpihak pada jurnalis perempuan. Bagaimana sesungguhnya esensi pengalaman jurnalis perempuan yang berada pada posisi pimpinan organisasi redaksi media massa? Bagaimana eksistensi jurnalis perempuan dalam organisasi redaksi media massa? Bagaimana peran jurnalis perempuan dalam kegiatan jurnalistik industri media massa?

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, digunakan teori strukturasi gender (Wolffensperger, 1991; Sunarto, 2007; 2009). Teori ini merupakan modifikasi dari teori strukturasi (Giddens, 1986; 1986) sebagai varian dari teori ekonomi-politik komunikasi massa dalam

paradigma kritis struktural dikaitkan dengan analisis feminis (Golding dan Murdock, 1991; 1995; Mosco, 1996; 2009; Guba dan Lincoln, 1994; Lincoln dan Guba, 2000; 2005; Ritzer, 1996; Tong, 1998).

Teori strukturasi gender menegaskan, proses produksi dan reproduksi sistem sosial (relasi gender) dipengaruhi oleh penggunaan aturan-aturan (rules) dan sumber daya-sumber daya (resources) yang dimiliki aktor pria dan wanita dalam interaksi sosial (Sunarto, 2007; 2009). Aturan berupa skema interpretasi-norma dan sumber daya berupa fasilitas ekonomi (alokatif) dan politik (otoritatif). Teori strukturasi gender mempunyai tiga konsep pokok terkait struktur, modalitas, dan interaksi.

Bagaimana dengan esensi pengalaman? Esensi pengalaman terkait dengan kesadaran substansial pengalaman aktor dalam interaksi sosial untuk menemukan makna hakiki realita kehidupan yang sedang dijalani. Makna ini dialami sebagai sebuah kesatuan fundamentalistik pengalaman kehidupan (Moustakas, 1994; Radford, 2005).

Dalam banyak aktivitas dan posisi jurnalistik, keberadaan jurnalis pria lebih dominan dibanding jurnalis perempuan. Penugasan jurnalistik yang diberikan kepada jurnalis pria lebih variatif dibanding penugasaan yang diberikan kepada jurnalis perempuan.

Metoda Penelitian

Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma kritis (Guba dan Lincoln, 1994; Lincoln dan Guba, 2000; 2005) utamanya varian konstruksionisme kritis (critical constructionism) (Heiner, 2006) ini menggunakan sebuah harian lokal ikonik di Kota Semarang sebagai situs penelitian dengan narasumber utama 4 (empat) orang jurnalis perempuan yang menduduki posisi pimpinan dan anggota desk. Data dianalisis dengan menggunakan prosedur dalam desain fenomenologi (Moustakas, 1994).

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis tekstural dan analisis struktural menunjukkan, proses maskulinisasi merupakan esensi pengalaman jurnalis perempuan dalam posisi pimpinan organisasi redaksi media. Pengalaman semacam ini terjadi dalam diri jurnalis perempuan tanpa mereka sadari sejak awal (Sunarto, 2014).

Maskulinisasi dalam diri jurnalis perempuan terjadi sebagai konsekuensi profesi yang dimasuki. Ritme kerja jurnalis bersifat maskulinistik karena seolah-olah jurnalis tidak mengenal waktu dalam menjalankan profesinya. Ritme kerja semacam ini merupakan satu kebiasaan yang harus diterima dan dilakukan oleh para jurnalis perempuan dalam industri media. Baik ketika mereka berada dalam posisi sebagai bawahan maupun pimpinan. Mereka harus selalu siap untuk bekerja selama duapuluh empat jam penuh.

Posisi minoritas sudah harus dialami saat pertama ikut proses rekrutmen pekerja. Di antara sekian banyak pelamar yang dipanggil untuk mengikuti proses seleksi, keberadaan calon jurnalis perempuan lebih sedikit dibanding calon jurnalis pria. Dalam aktivitas jurnalistik yang dilakukan para jurnalis perempuan, mereka mengalami dominasi maskulin. Apa itu dominasi maskulin? Dalam banyak aktivitas dan posisi jurnalistik, keberadaan jurnalis pria lebih dominan dibanding jurnalis perempuan. Penugasan jurnalistik yang diberikan kepada jurnalis pria lebih variatif dibanding penugasaan yang diberikan kepada jurnalis perempuan. Relatif tidak ada lokasi penugasan yang tabu untuk jurnalis pria dibanding jurnalis perempuan. Sementara penugasan jurnalistik yang sekiranya dianggap rawan dan berbahaya

berupa keyakinan dalam diri jurnalis perempuan bahwa profesi yang mereka geluti berdampak positif dan konstruktif bagi masyarakat.

terkait isu seperti kriminalitas akan dijauhkan dari jurnalis perempuan. Implikasi kondisi semacam ini menjadi sangat masuk akal ketika terjadi dominasi posisi jurnalistik oleh jurnalis pria. Lebih banyak jurnalis pria menduduki posisi pimpinan dibanding jurnalis perempuan. Parahnya, ada keengganan tersendiri di kalangan jurnalis pria ketika dipimpin oleh jurnalis perempuan.

Proses maskulinisasi mengalami perlawanan dari jurnalis perempuan dalam bentuk feminisasi jurnanisme. Jurnalis perempuan ketika melaksanakan praktik jurnanisme sehari-hari mengaktualisasikan prinsip-prinsip jurnanisme dengan cara berbeda yang mereka nilai lebih menguntungkan posisi kaum perempuan. Hal itu dilakukan melalui pemilihan narasumber berita perempuan dan penggunaan simbol-simbol bahasa eufemistik yang tidak menyudutkan perempuan, misalnya dalam berita kriminalitas yang melibatkan kaum perempuan. Jurnalis perempuan juga mengalami profetisasi jurnanisme berupa keyakinan dalam diri jurnalis perempuan bahwa profesi yang mereka geluti berdampak positif dan konstruktif bagi masyarakat.

Pembahasan

Eksistensi Jurnalis Perempuan dalam Organisasi Redaksi Media: Maskulinisasi sebagai Rutinisasi Tindakan Aktor Dominan

Salah satu temuan menonjol dalam penelitian terkait proses maskulinisasi jurnalis perempuan dalam industri media massa. Maskulinisasi berasal dari konsep maskulin, sebuah atribut sosial yang dilekatkan pada sosok individu berjenis kelamin biologis pria.

Secara sosial, menjadi pria haruslah memiliki sifat-sifat tertentu yang melekat dalam dirinya, misalnya, sebagai pemimpin, agresif, ambisius, analitik,

asertif, atletik, kompetitif, mempertahankan keyakinannya, dominan, kuat, punya kemampuan kepemimpinan, bebas, individualistik, mudah membuat keputusan, maskulin, percaya diri, mandiri, kepribadian kuat, kemauan bertanggung jawab dan keberanian menanggung risiko (Stacey, 1993; Unger, 1992; Richmond-Abbott, 1992).

Atribut sosial semacam itu berbeda dari yang dilekatkan dalam diri sosok individu berjenis kelamin perempuan. Dalam diri kaum perempuan dilekatkan sifat-sifat seperti afeksi, gembira, suka anak, penuh kasih sayang, tidak menggunakan bahasa kasar, punya hasrat besar untuk menyejukkan perasaan terluka, feminin, suka memuji, mengalah, lemah lembut, mudah tertipu, cinta anak-anak, setia, sensitif pada kebutuhan orang lain, malu, bicara halus, simpatik, sabar, pengertian dan hangat.

Atribut sosial semacam itu menjadi dasar bagi pria dan perempuan untuk menjalankan peran gender maskulin dan feminin tertentu di masyarakat. Menurut Richmond-Abbott (1992: 3-15), peran-gender (gender-role) maskulin dan feminin diciptakan secara sosial. Ekspektasi-ekspektasi ini digagas dan dilanggengkan melalui lembaga-lembaga dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat tertentu. Berbagai atribut personal tersebut menjadi amunisi penting bagi peran gender yang akan dijalankan setiap individu berdasarkan jenis kelaminnya. Setiap masyarakat bisa mempunyai ekspektasi peran gender tertentu yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Meskipun demikian, secara global terdapat kesamaan-kesamaan tertentu yang menjadikan peran gender tersebut bersifat universal. Misalnya, peran gender feminin lebih dilekatkan dengan ranah domestik bagi individu perempuan. Sedangkan peran gender maskulin di ranah publik lebih dilekatkan pada individu pria.

Berbagai ketidakadilan di masyarakat terkait peran-gender tersebut bisa saja diubah melalui sosialisasi jikalau sumber ketidakadilan kultural yang ada di masyarakat juga turut diubah. Misalnya, bisa saja kaum wanita diajarkan untuk berorientasi pada kepemimpinan, tanggung jawab, agresif, prestasi dan kompetisi jikalau mereka tidak dijauhkan dari kegiatan organisasi, olah-raga, akademik, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang

relevan di masyarakat. Kaum pria juga bisa diajari nilai-nilai pengasuhan dan ekspresi emosi jikalau masyarakat berhenti untuk menghukum kaum pria dengan nilai-nilai semacam itu.

Sosialisasi peran gender tersebut terjadi melalui praktik sosial yang dilakukan secara rutin setiap hari. Dalam terma Giddens dikenal dengan istilah rutinisasi tindakan (Turner, 1991). Dalam pandangan Giddens (1986), domain dasar dalam kajian ilmu sosial bukanlah pengalaman aktor individual ataupun eksistensi dari totalitas masyarakat dalam bentuk apapun, melainkan praktek sosial (social practice) yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang (recursive) yang melampaui ruang (space) dan waktu (time). Praktek sosial tersebut mewujud karena adanya aktivitas yang dilakukan para aktor sosial secara terus-menerus untuk dilakukan dan dilakukan kembali oleh para aktor tersebut melalui setiap sarana ekspresi-diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui praktek sosial para aktor itu mereproduksi kondisi yang membuat praktek sosial tersebut menjadi mungkin untuk dilakukan.

Dalam kehidupan sehari-hari stereotipi peran gender maskulin dan feminin dilekatkan secara sosial dalam diri kita masing-masing sebagai individu dan kelompok sehingga kita berlaku sebagai orang normal. Tindakan bertentangan dengan atribut sosial tersebut akan menjadikan seorang individu dilabeli sebagai menyimpang dan tidak normal. Dalam konteks industri media, untuk bisa bertahan dan berkembang, seorang jurnalis perempuan dikondisikan untuk menjadikan dirinya sebagai seorang maskulin, bukan lagi feminin. Dalam diri jurnalis perempuan harus ada sifat tegas, ambisius, bertanggung jawab, kepemimpinan, berani ambil risiko dan sifat-sifat maskulinistik lainnya untuk bisa menjalani profesinya dengan baik. Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di kantor redaksi menjadikan jurnalis perempuan dibiasakan dan akhirnya terbiasa dengan ritme kerja jurnalis pria. Rutinisasi tindakan yang berlangsung sehari-hari ini akhirnya menjadikan atribut maskulin meresap dalam diri jurnalis perempuan. Apabila mengikuti cara berfikir Richmond-Abbott tersebut di atas, proses maskulinisasi semacam ini bisa berkonotasi positif bagi pemberdayaan jurnalis perempuan.

Peran Jurnalis Perempuan dalam Jurnalisme Media: Feminisasi Jurnalisme

Salah satu aspek positif yang dilakukan jurnalis perempuan dalam posisi mereka di jajaran pimpinan redaksi adalah feminisasi jurnalisme. Dalam menjalankan profesinya sebagai pimpinan desk, jurnalis perempuan melakukan resistensi terhadap nilai-nilai patriarkisme secara keseluruhan melalui feminisasi jurnalisme ini.

Dimaksudkan dengan feminisasi jurnalisme adalah ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan desk, jurnalis perempuan memasukkan nilai-nilai feminin dalam proses jurnalistik yang berlangsung. Hal itu terjadi melalui pemilihan narasumber, penentuan sudut pandang pemberitaan, dan pemilihan simbol-simbol linguistik tertentu yang lebih membela kepentingan kaum perempuan dalam setiap pemberitaan.

Sebagaimana diketahui, kegiatan jurnalisme secara umum terkait dengan kegiatan pengelolaan informasi: cari, koleksi, format, dan publikasi (Mursito BM, 2006; Sunarto, 2015). Dalam pelaksanaannya, kegiatan jurnalistik mengandung aspek teknis dan etis. Aspek teknis terkait dengan kegiatan koleksi informasi dan formasi informasi. Aspek etis terkait dengan nilai dan norma untuk publikasi informasi.

Feminisasi jurnalisme terjadi manakala dalam proses koleksi dan formasi informasi ini dikaitkan dengan nilai-nilai etis untuk melindungi kepentingan kaum perempuan. Masuknya nilai-nilai etis feministik dalam perkara teknis jurnalisme tersebut akan berimplikasi pada pemilihan narasumber dan simbol-simbol linguistik, serta pemingkakan berita yang tidak menyudutkan kepentingan kaum perempuan.

Masuknya nilai-nilai etis feministik dalam perkara teknis jurnalisme tersebut akan berimplikasi pada pemilihan narasumber dan simbol-simbol linguistik...

Nilai-nilai etis feministik tersebut sangat mewarnai kinerja jurnalis perempuan ketika melakukan kegiatan jurnalistik dalam hal komitmen pada kebenaran peristiwa, tanggung jawab pada konsumen media, serta kejelasan dan ketepatan dalam aktualisasi (Mursito BM, 2006; Sunarto, 2015).

Ketiga karakteristik kegiatan jurnalistik tersebut tidak bisa ditawar dalam aktualisasinya di ranah empiris. Jurnalis perempuan harus berkomitmen pada kebenaran realita yang terjadi disebabkan informasi yang tersaji dalam media nantinya akan digunakan oleh khalayaknya sebagai salah satu basis penting dalam pengambilan keputusan. Kesalahan informasi akan menimbulkan kesesatan pikir dan keputusan khalayak media dalam kehidupan mereka.

Feminisasi jurnalisme tidak boleh menimbulkan misinformasi. Pemilihan narasumber dan pembingkai berita yang tidak merugikan kepentingan kaum perempuan harus didasari oleh fakta dan realita nyata. Selama ini ada begitu banyak narasumber perempuan berkompeten di bidangnya yang diabaikan oleh jurnalis pria. Memberi kesempatan kepada narasumber perempuan untuk mendefinisikan realita dari sudut pandang perempuan merupakan bentuk tanggung jawab jurnalis perempuan kepada khalayak media yang beragam latar belakang sosio-kultural-politik-ekonomi dan gendernya. Sekaligus, ketika hal ini dilakukan, jurnalis perempuan memberikan edukasi kepada khalayaknya, bahwa realita kehidupan bisa disajikan melalui sudut pandang feminin yang bisa lebih baik dari pada sudut pandang maskulin. Selain itu, kelebihan jurnalis perempuan dalam hal ketelitian dan kecermatan akan berdampak besar pada aspek ketepatan dan akurasi berita. Pendek kata, feminisasi jurnalisme yang dilakukan jurnalis perempuan akan semakin meningkatkan derajat jurnalisme menjadi semakin kondusif, inovatif dan variatif.

Kegiatan jurnalistik semacam itu sangat strategis untuk menciptakan perubahan sosial humanistik bagi kaum perempuan yang selama ini selalu dipinggirkan dalam berbagai ranah publik yang ada. Hal ini dimungkinkan apabila dikaitkan dengan fungsi media di masyarakat untuk

mensosialisasikan nilai-nilai tertentu melalui fungsi pengawasan lingkungan, penghubung berbagai elemen masyarakat, dan penyalur warisan sosial (McQuail, 2005; Shoemaker dan Reese, 1991).

Feminisasi jurnalisme telah meningkatkan kemampuan media untuk melakukan pengawasan lingkungan terkait peminggiran hak-hak kaum perempuan di masyarakat. Selain itu, melalui fungsi pengawasan tersebut, media menjadi penghubung strategis berbagai kepentingan feminin dan maskulin yang ada untuk bersama-sama disinergikan secara konstruktif bagi kemajuan bersama. Apabila kondisi semacam itu bisa terwujud secara masif, feminisasi jurnalisme akan memberikan warisan berharga bagi generasi berikutnya untuk bersikap dan berlaku bijak dalam berinteraksi dengan sesama di masyarakat. Latar belakang biologis seseorang tidak lagi menjadi penghalang bagi kemajuan yang akan diraihnyanya.

Dominasi Maskulin dalam Praktek Redaksi Media: Mengapa Masih Terjadi?

Sayangnya, praktek feminisasi jurnalisme tersebut masih belum mampu mengatasi dominasi maskulin yang terjadi di organisasi redaksi media. Mengapa demikian?

Menurut Bourdieu (dalam Mottier, 2004; Krais, 1993), dominasi maskulin (masculine domination) terjadi disebabkan karena kaum perempuan telah menjadi korban kekerasan simbolik (symbolic violence) tertentu.

Dalam pandangan Bourdieu, dominasi maskulin terjadi berdasarkan dua asumsi. Pertama, adanya pengertian mengenai struktur kognitif dan struktur objektif dari masyarakat androsentrik yang secara khusus telah dijaga dengan baik untuk memberikan instrumen yang memungkinkan seseorang untuk mengerti beberapa aspek terbaik yang disembunyikan dari relasi semacam itu dalam masyarakat paling maju secara ekonomis.

Kedua, adanya unit domestik sebagai satu dari situs-situs yang digunakan oleh dominasi maskulin untuk mewujudkan dirinya sendiri melalui mekanisme yang paling tidak dapat disangkal dan yang paling terlihat. Hal ini merupakan prinsip pengabdian (perpetuation) relasi kekuasaan simbolik dan material yang digunakan secara luas di luar unit tersebut melalui agensi semacam

gereja, sistem pendidikan atau negara.

Menurut Bourdieu, tubuh, seksualitas dan identitas pria dan perempuan dikonstruksi secara sosial bukannya "ada secara alamiah". Legitimasi dominasi maskulin terjadi melalui naturalisasi. Kekuatan dari *sociodicy* maskulin terjadi datang dari fakta bahwa kekuatan itu menggabungkan dan memadatkan dua kegiatan: pengesahan sebuah hubungan dominasi melalui pelekatan pada sifat biologisnya dan pelekatan itu dinaturalisasikan melalui konstruksi sosial. Bekerjanya konstruksi simbolik itu jauh dari sekedar kerja performatif secara kaku dalam penyebutan yang mempunyai orientasi dan struktur representasi terkait dengan tubuh. Konstruksi simbolik tersebut bekerja dan mencapai puncaknya dalam transformasi tubuh (dan pikiran) secara mendalam dan bertahan lama.

Sebagai hasil dari konstruksi simbolik, kekerasan simbolik terhadap kaum perempuan terjadi dalam kegagalan mereka mengenali (*misrecognition*) dominasi atas diri mereka sendiri. Sesungguhnya pengaturan yang dibedakan secara seksual (*habitus*) mengarahkan pihak yang didominasi mengambil sudut pandang dominan pada pihak yang dominan dan mereka sendiri. Dominasi maskulin menemukan satu dari pendukung terkuatnya dalam kegagalan pengenalan (*misrecognition*) yang merupakan hasil dari aplikasi pada kategori dominan yang ditimbulkan dari relasi dominasi, dan yang dapat mengarahkan pada bentuk ekstrim dari *amor fati* (cinta pada yang dominan dan dominasinya), *libido dominantis* (hasrat pada yang dominan) yang mempunyai implikasi pada penolakan pengalaman personal pada *libido dominandi* (hasrat untuk mendominasi).

Dengan mencermati penjelasan tersebut bisa ditegaskan, dominasi maskulin masih lebih unggul beroperasi dalam organisasi redaksi media melalui praktek maskulinisasi jurnalisme dibandingkan praktek feminisasi jurnalisme. Norma dan ritme kerja maskulin yang dikondisikan dan dinaturalisasikan sebagai struktur kognitif dan struktur objektif dalam diri jurnalis perempuan akhirnya diterima sebagai standar perilaku profesional yang alamiah. Jurnalis perempuan tidak lagi mengenali nilai dominatif

yang melingkupi kegiatan profesionalnya ketika disembunyikan dalam kepentingan profetik dan domestik. Misalnya, atas nama keselamatan, jurnalis perempuan dijauhkan dari isu-isu keras semacam kriminalitas dan terorisme, dan lebih didekatkan dengan isu-isu lunak semacam pendidikan, pariwisata, dan rumah tangga. Hal ini bisa ditemui pada kasus ketika seorang jurnalis perempuan senior lebih mendahulukan kepentingan mengurus anak-anaknya ketimbang posisi sebagai wakil pimpinan redaksi sebuah koran besar. Posisi itu diterima ketika anak-anaknya sudah bisa mandiri.

Feminisasi jurnalisme akhirnya ibarat riak dalam gelombang besar maskulinisasi jurnalisme yang membanjiri seluruh praktek jurnalistik yang ada. Pemilihan narasumber perempuan, pembingkai dan rubrikasi bernuansa kepentingan perempuan masih bersifat insidental. Beberapa waktu lalu kita jumpai rubrikasi khusus tentang wanita semacam "Swara" (Kompas), "Wanita" (Suara Merdeka), "Wanita" (MetroTV), "Aku Perempuan" dan "Silat Lidah" (ANTV), "Sakinah" dan "Seni Menata Hati" (TVKU) dan "Kharisma Wanita" (RRI Semarang) (Sunarto, 2015). Masalahnya, apakah semua rubrikasi tersebut masih bertahan hingga sekarang? Isu terkait kepentingan perempuan muncul secara insidental ketika terjadi kasus. Belum lagi menjadi standar nilai profesional tersendiri. Misalnya, kasus perkosaan yang dialami oleh seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi ketika sedang menjalani kegiatan kuliah kerja nyata menjadi pemberitaan media lokal dan nasional. Sayangnya, informasi terkait kekerasan seksual ini masih dibingkai dengan format dominatif: menyalahkan korban (*blaming the victim*)!

Tampaknya, dalam terminologi strukturasi gender, masih dibutuhkan kerja keras segenap aktor media, baik jurnalis pria maupun perempuan, untuk menjadikan struktur internal dan eksternal mereka supaya sadar gender. Dibutuhkan regulasi formal dalam praktek bermedia untuk menempatkan kesadaran gender sebagai salah satu nilai yang digunakan dalam praktik organisasi redaksi media. Sekaligus juga bekal bagi segenap aktor media yang ada untuk mempunyai kesadaran gender dalam diri mereka sebagai aturan (*skema interpretasi dan norma*) dan sumber daya (*alokatif dan otoritatif*) utama untuk dipraktekkan dalam

kegiatan interaksi sehari-hari di ruang redaksi. Apabila struktur media dan aktornya ini sudah digenderkan, praktik jurnalistik yang menyudutkan kaum perempuan tidak akan lagi dijumpai dalam realita keseharian kita.

Penutup

Jurnalis perempuan di media masih menjadi kelompok minoritas. Mereka masih mengalami dominasi maskulin dalam organisasi redaksi media. Aktualisasi dominasi maskulin tersebut terjadi dalam bentuk pengalaman maskulinisasi jurnalisisme. Jurnalis perempuan mengalami transformasi nilai-nilai maskulin dalam diri mereka sebagai konsekuensi menjalani profesi jurnalis. Transformasi nilai ini terjadi melalui rutinisasi tindakan dalam praktik jurnalistik yang menaturalisasikan struktur kognitif dan struktur objektif yang maskulinistik. Praktik feminisasi jurnalisisme yang dilakukan jurnalis perempuan sebagai antitesis praktek maskulinisasi jurnalisisme belum mencapai posisi seimbang. Masih dibutuhkan naturalisasi struktur kognitif dan struktur objektif sadar gender untuk menjadikan praktek jurnalistik bermakna untuk semua kelompok gender yang ada di masyarakat. Hal ini terwujud manakala struktur media dan aktor-aktornya sudah digenderkan semua.

Daftar Pustaka

- Anonimous. (2002). UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika
- Anonimous. (1984). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Jakarta.
- Chamber, Deborah dan kolega. (2004). *Women and Journalism*. London and New York: Routledge
- Golding, Peter dan Graham Murdock. (1995). "For a political economy of mass communications". Dalam Oliver Boyd-Barret dan Chris Newbold (eds.),
- Approaches to Media: A Reader. London: Edward Arnold: page 201 - 215.
- Golding, Peter dan Graham Murdock. (1991). "Culture, Communications, and Political Economy". Dalam James Curran dan Michael Gurevitch (eds.),
- Mass Media and Society. London: Edward Arnold: page 15 - 32
- Guba, Egon G. & Yvonna S. Lincoln. (1994). "Competing Paradigms in Qualitative Reserch". Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.),
- Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications: 105-117
- Giddens, Anthony. (1986). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press: Berkeley.
- Giddens, Anthony. (1986). *Central Problems in Social Research: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press
- Heiner, Robert. (2006). *Social Problems: An Introduction to Critical Constructionism* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
- Johnson, Sammye. (1993). "Women's Employment and Status in the Magazine Industry". Dalam Pamela J. Creedon (ed.), *Women in Mass Communication*. Newbury Park: Sage Publication: page 134-153
- Krais, Beate. (1993). "Gender and Symbolic Violence: Female Oppression in the Light of Pierre Bourdieu's Theory of Social Practice". Dalam Craig Calhoun dan kolega (eds.), *Bourdieu: Critical Perspectives*. Great Britain: The University of Chicago Press: page 156-177
- Lincoln, Yvonna S. & Egon G. Guba. (2000; 2005). "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences". Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research* (2nd./3rd ed). Thousand Oaks: Sage Publications: 163-187/191-216
- McQuail, Denis. (2005). *McQuail's Mass Communication Theory* (5th ed.). London: Sage Publications
- Mosco, Vincent. (1996; 2009). *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*. London: Sage Publications.
- Mottier, Veronique. (2004). "Masculine Domination: Gender and Power in Bourdieu's Writings". <http://fty.sagepub.com/cgi/reprint/3/3/345>.

- Download 13 Oktober pukul 12.25
- Moustakas, Clark. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications
- Mursito BM. (2006). *Memahami Institusi Media: Sebuah Pengantar*. Karanganyar: Lindu Pustaka
- Radford, Gary P. (2005). *On The Philosophy of Communication*. Belmont: Thomson-Wadsworth
- Richmond-Abbott, Marie. (1992). *Masculine & Feminine: Gender Roles Over The Life Cycle* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill Inc.
- Ritzer, George. (1996). *Sociological Theory* (4th ed.). New York: The McGraw-Hill Company Inc.
- Sanders, Marlene. (1993). "The Face of Network News is Male". Dalam Pamela J. Creedon (ed.). *Women in Mass Communication* (2nd ed.). Newbury Park: Sage Publications: page 167-171
- Shoemaker, Pamela J. dan Stephen D. Reese. (1991). *Mediating the Message: Theories of Influence on Mass Media Content*. New York: Longman Publishing Group.
- Siregar, Ashadi dan kolega. (1999). *Media dan Gender: Perspektif Gender atas Industri Surat kabar Indonesia*. Yogyakarta: Galang Printika
- Soemandoyo, Priyo. (1999). *Wacana Gender dan Layar Televisi: Studi Perempuan dalam Pemberitaan Televisi Swasta*. Yogyakarta: Ford Foundation dan LP3Y
- Sunarto. (2016). "Sensitif Gender dalam Liputan Media". *Jurnal Dewan Pers* (Edisi 12; September). Jakarta: 85-96
- Sunarto. (2015). "Esensi Pengalaman Profesional Wartawan Media Lokal". Laporan Penelitian. Semarang: 1-100
- Sunarto. (2014). "Esensi Pengalaman Pekerja Wanita dalam Manajemen Media Lokal". Laporan Penelitian. Semarang: 1-86
- Sunarto. (2015). "Fenomenologi: Esensi Profesi Wartawan Media Lokal". Makalah. Disajikan dalam COMNEWS UMN 2015 pada 19-20 Mei 2015 di Jakarta: hal. 1-10
- Sunarto. (2009). *Televisi, Kekerasan & Perempuan*. Gramedia: Jakarta
- Sunarto. (2009). "Strukturasi Gender: Kekerasan terhadap Wanita dalam Program Anak Televisi Indonesia". Laporan Penelitian. Semarang: 1-195
- Suryandaru, Yayan Sakti. (2002). *Potret Kesadaran Gender Orang Media*. Surabaya: Lutfansah Mediatama
- Stacey, Jackie. (1993). "Untangling Feminist Theory". Dalam Diane Richardson dan Victoria Robinson (Eds.), *Introducing Women's Studies: Feminist Theory and Practice*. Houndmills: The MacMillan Press Ltd.: Hal. 49-73.
- Tong, Rosemarie Putnam. (1998). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Boulder & San Fransisco: Westview Press.
- Turner, Jonathan H. (1991). *The Structure of Sociological Theory* (5th ed.). Belmont: Wadsworth Publishing Company
- Unger, Rhoda dan Mary Crawford. (1992). *Women and Gender: A Feminist Psychology*. United States of America: McGraw-Hill.
- Wolffensperger, Joan. (1991). "Engendered Structure: Giddens and the Conceptualization of Gender". Dalam Kathy Davis dan kawan-kawan (eds.). *The Gender of Power*. London: Sage Publications: page 87-110
- Zoonen, Liesbet van. (1994). *Feminist Media Studies*. London: Sage Publication